



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN



LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2020 DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

KATA PENGANTAR

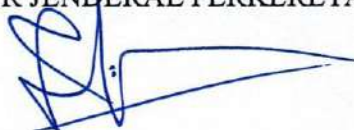
Pembangunan infrastruktur perkeretaapian dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan transportasi massal yang handal dan berdaya saing sehingga diharapkan dapat mengatasi permasalahan transportasi di wilayah perkotaan maupun antar kota. Pembangunan infrastruktur perkeretaapian saat ini dilaksanakan secara bertahap di wilayah pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Untuk mengetahui capaian pelaksanaan pembangunan tersebut serta capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator bidang transportasi perkeretaapian, diperlukan monitoring/pemantauan yang selanjutnya dituangkan dalam laporan monitoring capaian kinerja.

Laporan monitoring capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian sampai dengan Triwulan II tahun 2020 merupakan laporan realisasi kinerja secara berkala/triwulan atas pelaksanaan target kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Selain mengetahui capaian kinerja unit kerja, juga diidentifikasi kendala/permasalahan yang ada sehingga dapat dilaksanakan upaya-upaya mengatasi permasalahan serta percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur perkeretaapian.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan monitoring kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian sampai dengan Triwulan II tahun 2020.

Jakarta, 20 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. ZULFIKRI, M.Sc., DEA.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19620709 199203 1 002

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	
BAB I : PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	I-1
I.2 Maksud dan Tujuan	I-2
I.3 Tugas dan Fungsi	I-2
I.4 Struktur Organisasi	I-3
I.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	I-8
a. Perjanjian Kinerja	I-8
b. Alokasi Anggaran Tahun 2020	1-10
BAB II : CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	
II.1 Tahap Pengukuran Kinerja	II-1
II.2 Pengukuran Capaian Kinerja	II-2
II.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Peranjian Kinerja Tahun 2020 Pada Sasaran Pertama	II-2
II.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pada Sasaran Kedua	II-6
II.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pada Sasaran Ketiga	II-11
II.3 Realisasi Anggaran	II-15

BAB III : PENUTUP

III.1 Tindaklanjut Rekomendasi Triwulan I	III-1
III.2 Kesimpulan	III-2
III.3 Rekomendasi	III-4

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diwajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan baik (*Good Governance*).

Dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menyelenggarakan tahapan dan komponen SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan reviu serta evaluasi kinerja. Salah satu wujud komponen pengukuran dan pengelolaan data kinerja adalah melalui pelaporan monitoring capaian kinerja secara berkala (setiap triwulan) untuk mengetahui kemajuan capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai target yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan disebutkan bahwa *monitoring* merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Oleh karena itu pelaporan monitoring capaian kinerja secara berkala/triwulan sangat diperlukan dalam upaya memastikan pencapaian target kinerja melalui pengukuran kinerja, identifikasi permasalahan/kendala serta merekomendasikan keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan untuk perbaikan pada periode selanjutnya.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan laporan monitoring capaian kinerja triwulan II tahun 2020 Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilaksanakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Memantau kemajuan pelaksanaan/progress capaian masing-masing indikator kinerja;
- b. Mengidentifikasi kendala/hambatan dalam pencapaian realisasi target indikator kinerja per triwulan;
- c. Menyusun rekomendasi penyelesaian kendala/hambatan serta upaya percepatan guna mencapai target yang telah ditetapkan.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sesuai tugas pokoknya Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Direktorat Jenderal Perkeretaapian dipimpin oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

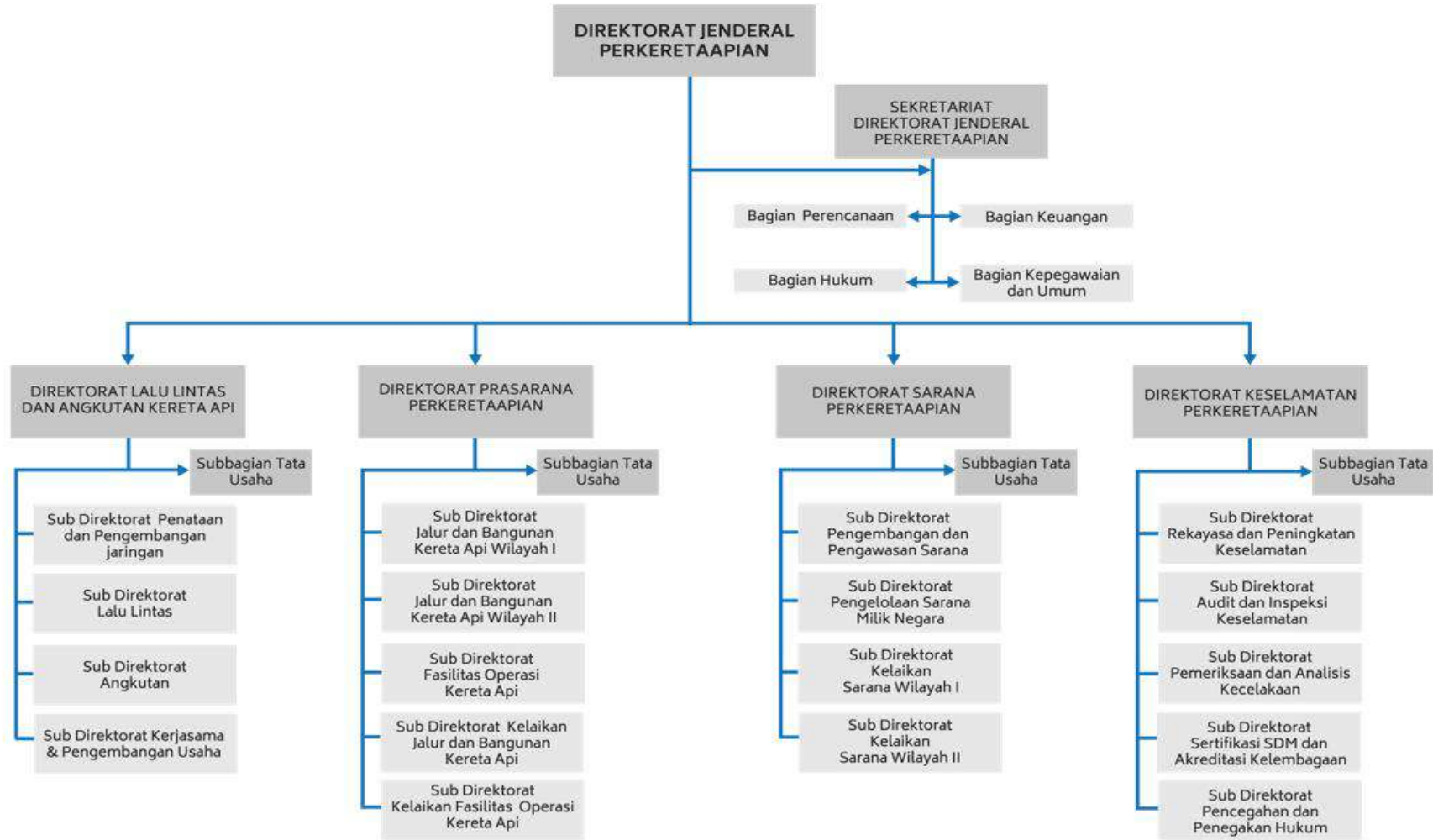
1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai struktur organisasi terdiri dari :

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
- 3) Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
- 4) Direktorat Sarana Perkeretaapian; dan
- 5) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
- 6) Unit Kerja Mandiri Setingkat Eselon III, dengan rincian :
 - a) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jakarta dan Banten;
 - b) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Barat;
 - c) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah;
 - d) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Timur;
 - e) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Utara;
 - f) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat;
 - g) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Selatan;
 - h) Balai Pengujian Perkeretaapian;
 - i) Balai Perawatan Perkeretaapian;
 - j) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sedangkan untuk Balai Teknik Perkeretaapian diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian dan untuk Balai Pengujian Perkeretaapian diatur melalui

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian, Balai Perawatan Perkeretaapian diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian serta Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 s.d 1.6 berikut ini :



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Ditjen Perkeretaapian



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I



Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II



Gambar 1. 4 Struktur Organisasi Balai Pengujian dan Balai Perawatan Perkeretaapian



Gambar 1. 5 Struktur Organisasi Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

1.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

a. Perjanjian Kinerja

Target kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan dokumen perjanjian kinerja tahun 2020 sebagaimana terlihat pada Tabel 1.3.

b. Alokasi Anggaran Tahun 2020

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan dokumen perjanjian kinerja tahun 2020 sebesar Rp. 12.561.159.705.746,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Alokasi Anggaran Per Kegiatan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2020

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian	434.482.704.000
2.	Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	355.688.450.000
3.	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana serta Fasilitas Pendukung Kereta Api	11.540.304.351.000
4.	Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian	169.539.391.000
5.	Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian	63.695.057.000
TOTAL		12.561.159.705.746

Tabel 1. 2 Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja Ditjen Perkeretaapian Tahun 2020

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp.)
1.	Belanja Pegawai	95.018.187.000
2.	Belanja Barang	2.454.159.597.000
3.	Belanja Modal	10.014.532.169.000

Dengan adanya perubahan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020 dengan adanya pemotongan anggaran berdasarkan Perpres 54 tahun 2020, maka selanjutnya diperlukan revisi dokumen perjanjian kinerja tahun 2020 dimana juga mempengaruhi target dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 1. 3 Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
SP1 Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,39	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah PKN/PKW sebanyak 30 (eksisting sebanyak 26 lokasi dan penambahan pada tahun 2020 sebanyak 4 lokasi yaitu Langsa, Marros, Pangkajene dan Barru) Jumlah Bandar Udara sebanyak 7 Bandara (eksisting sebanyak 5 lokasi dan penambahan pada tahun 2020 sebanyak 2 lokasi yaitu Bandara Kulon Progo, Bandara Raden Inten) Jumlah Pelabuhan sebanyak 6 Pelabuhan (eksisting sebanyak 4 lokasi dan penambahan pada tahun 2020 sebanyak 2 lokasi yaitu Pelabuhan Tj. Emas dan Pelabuhan Garongkong)
SP2 Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api	IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh	0,23	Jumlah kejadian kecelakaan indikasi sebanyak 22 kejadian dengan Km Tempuh sebesar 95.582.730 Km

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
	IK3 Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api	Kejadian gangguan keamanan/ 1 juta km tempuh	6,4	Jumlah gangguan keamanan indikasi sebanyak 612 gangguan dengan Km Tempuh sebesar 95.582.730 Km
SP3 Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api	IK4 Prosentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	%	70	Jumlah kedatangan KA penumpang tepat waktu indikasi sebanyak 440.152 perjalanan dan total kedatangan KA sebanyak 628.788 perjalanan
	IK5 Persentase peningkatan angkutan kereta api penumpang	%	4,83	Target jumlah angkutan penumpang pada tahun 2020 sebanyak 472.638.818 penumpang
	IK6 Persentase peningkatan angkutan kereta api barang	%	4,07	Target jumlah angkutan barang pada tahun 2020 sebanyak 55.833.755 ton
	IK7 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	82,84	Panjang jalur KA yang beroperasi sesuai dengan TQI (kecepatan 80 s.d 120 Km/jam) sepanjang 4.669,718 Km (eksisting sepanjang 4.593,718 Km dan penambahan hasil perawatan/peningkatan sepanjang 76 Km)

BAB II

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II

Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkesinambungan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara kontinyu yang dimulai dari pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja dan penilaian kinerja secara berkala melalui laporan monitoring triwulan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.1 TAHAP PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran pencapaian kinerja pada laporan ini menggunakan formula sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan cara perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut :

1. Kondisi pertama, apabila output suatu kegiatan **tidak tercapai sesuai dengan target**, formula yang dipergunakan adalah :

$$\text{Tingkat Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Kondisi kedua, apabila output suatu kegiatan **tercapai sesuai dengan target tetapi biaya yang digunakan lebih rendah dari rencana anggaran**, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$\text{Tingkat Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja per triwulan adalah :

1. Perbandingan capaian kinerja pada triwulan II tahun 2020 terhadap target kinerja triwulan II tahun 2020;
2. Realisasi anggaran unit kerja triwulan II tahun 2020;
3. Identifikasi kendala dan hambatan serta rekomendasi upaya peningkatan kinerja.

2.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pada tahun 2020 telah ditetapkan target yang harus dicapai oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020 untuk dijadikan acuan dalam pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pada Sasaran Meningkatnya Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional

Target rasio konektivitas antar wilayah sebesar 0,31 rasio atau sebanyak 35 PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional dan realisasi sebesar 0,31 rasio atau sebanyak 35 PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional. Realisasi pada triwulan II tahun 2020 masih sama dengan realisasi triwulan I tahun 2020 dikarenakan pada triwulan II tahun 2020 belum terdapat progres pembangunan jalur KA yang selesai (masih dalam progres konstruksi).

Rincian target dan realisasi pada triwulan II tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Target PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional Tahun 2020

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2020	
		Target	Realisasi
Pusat Kegiatan Nasional / Pusat Kegiatan Wilayah/ Kawasan Strategis Nasional			
1	Jabotabek	√	√
2	Bandung	√	√
3	Semarang	√	√
4	Surabaya	√	√
5	Yogyakarta	√	√
6	Medan	√	√
7	Padang	√	√
8	Palembang	√	√
9	Lampung	√	√
10	Cirebon	√	√
11	Solo	√	√

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2020	
		Target	Realisasi
12	Madiun	√	√
13	Purwokerta	√	√
14	Malang	√	√
15	Tegal	√	√
16	Sukabumi	√	√
17	Rangkasbitung	√	√
18	Serang	√	√
19	Cilegon	√	√
20	KEK Sei Mangke	√	√
21	Binjai	√	√
22	Besitang	√	√
23	Simpang	√	√
24	Baturaja	√	√
25	Prabumulih	√	√
26	Langsa	√	-
27	Rantau Prapat	√	√
28	Marros	√	-
29	Pangkajene	√	-
30	Barru	√	-
Simpul Transportasi Bandar Udara			
1	Bandar Udara Kualanamu	√	√
2	Bandar Udara Internasional Minangkabau	√	√
3	Bandar Udara Soekarno Hatta	√	√
4	Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II	√	√
5	Bandar Udara Adi Soemarmo	√	√
6	Bandar Udara Kulon Progo	√	-
7	Bandar Udara Raden Inten	√	-
Simpul Transportasi Pelabuhan			
1	Pelabuhan Tj. Priok	√	√
2	Pelabuhan Kuala Tanjung	√	√
3	Pelabuhan Tj. Emas	√	-
4	Pelabuhan Merak	√	√
5	Pelabuhan Sungai Kertapati	√	√
6	Pelabuhan Garongkong	√	-
JUMLAH		43	35

Realisasi rasio konektivitas antar wilayah s.d triwulan II tahun 2020 sebesar 0,31 atau capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada triwulan II yaitu sebesar 0,31. Realisasi triwulan II dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Per Triwulan Rasio Konektivitas antar Wilayah

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Target		Realisasi		Kinerja (%)		Kinerja 2020 (%)
			TW1	TW2	TW1	TW2	TW 1	TW2	
Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,39	0,31	0,31	0,31	0,31	100	100	79,49

Identifikasi Kendala/Permasalahan

Pusat Kegiatan Nasional / Pusat Kegiatan Wilayah/ Kawasan Strategis Nasional dan simpul transportasi yang belum terhubung berdasarkan target Perjanjian Kinerja yaitu :

- a) Pembangunan jalur KA Makassar – Parepare (PKN Makassar, PKW Pangkajene, PKW Marros dan PKW Barru) masih terkendala permasalahan pengadaan lahan di wilayah Pangkep (kebutuhan 2.196 bidang) dan Marros (kebutuhan 938 bidang) dengan progres yang sudah terbayar baru sekitar 15%. Penyebab keterlambatan progres pengadaan lahan diantaranya adanya penolakan masyarakat terhadap nilai ganti rugi, ketidaklengkapan dokumen/berkas kepemilikan lahan masyarakat sehingga menghambat proses verifikasi pembayaran, proses perijinan lahan yang berstatus kawasan hutan, pembebasan lahan dengan kriteria K3 (lahan milik Pemerintah yang dikuasai masyarakat dalam waktu lama secara turun temurun), dan lainnya.
- b) Pembangunan akses jalur KA menuju Pelabuhan Garongkong direncanakan lintas cabang sepanjang 4,7 km'sp dan baru terealisasi sepanjang 3,7 km'sp melalui pembiayaan SBSN. Konstruksi belum dilanjutkan karena belum tersedia anggaran pembangunan dan kelanjutannya direncanakan melalui pembiayaan KPBU termasuk penyediaan *stock yard* / area konektivitas dengan Pelabuhan.
- c) Pembangunan jalur KA Besitang – Langsa tahap pertama segmen Besitang – Sei Liput sepanjang 35 km masih proses konstruksi (kontrak tahun jamak 2017-2020) dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2020. Kendala pembangunan diantaranya kondisi lahan di beberapa titik/lokasi tubuh baan mengalami penurunan (kondisi tanah kurang baik) dimana membutuhkan kajian lanjut dan menghambat progres konstruksi.
- d) Pembangunan akses jalur KA menuju Bandara YIA Kulonprogo masih dalam proses pengadaan lahan (progres 44%) dan konstruksi jalur kereta api sepanjang 6 km'sp (progres 19%). Kendala pembangunan diantaranya keterlambatan penyelesaian pengadaan lahan, pembatasan akibat pandemi COVID-19 yang menghambat progres

konstruksi dan proses pengadaan lahan, selain itu juga karena adanya perubahan desain teknis.

- e) Pembangunan akses jalur KA menuju Pelabuhan Tanjung Emas terkendala dengan kesiapan lahan berupa kejelasan status lahan dan pelaksanaan penertiban lahan di sekitar pelabuhan. Selain itu dengan adanya penghematan anggaran melalui Perpres 54 tahun 2020, maka alokasi anggaran kegiatan tersebut ditunda akibat pemotongan anggaran rupiah murni untuk penanganan COVID-19.
- f) Pembangunan akses jalur/emplasemen dan stasiun KA Bandara Raden Inten II terkendala kejelasan status aset dan perjanjian kerjasama dengan pengelola bandara. Selain itu dengan adanya penghematan anggaran melalui Perpres 54 tahun 2020, maka alokasi anggaran kegiatan tersebut ditunda akibat pemotongan anggaran rupiah murni untuk penanganan COVID-19.

Upaya Peningkatan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja rasio konektivitas antar wilayah, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan pembangunan sehingga jalur kereta api dapat terhubung ke Pusat Kegiatan Nasional /Pusat Kegiatan Wilayah/ Kawasan Strategis Nasional dan Simpul Transportasi tepat waktu sesuai dengan rencana pembangunan. Langkah-langkah lanjut pada lokasi yang ditargetkan terhubung pada tahun 2020 antara lain:

- a) Percepatan pelaksanaan verifikasi dan pembayaran pengadaan lahan melalui koordinasi intensif dengan LMAN, BPN serta Pemerintah Daerah setempat. Selain itu juga diperlukan edukasi dan pemahaman kepada Pihak Yang Berhak tentang peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan manfaat pembangunan infrastruktur. Untuk bidang yang tidak setuju dengan nilai ganti rugi maka diajukan melalui proses konsinyasi di Pengadilan. Upaya percepatan pengadaan lahan juga dilaksanakan dengan mekanisme dana talangan dan sewa lahan oleh kontraktor sehingga dapat dilakukan percepatan pelaksanaan konstruksi jalur KA Makassar – Parepare.
- b) Penyelesaian pembangunan akses jalur KA menuju Pelabuhan Garongkong telah diusulkan melalui pembiayaan lingkup KPBU, dimana saat ini telah dilakukan pembahasan secara intensif untuk modifikasi lingkup perjanjian KPBU. Selain untuk pembiayaan konstruksi, lingkup KPBU juga diusulkan untuk pembiayaan pengadaan

lahan kebutuhan *stockyard* di area Pelabuhan Garongkong seluas 5 Ha. Oleh karena itu diperlukan percepatan penyelesaian modifikasi lingkup perjanjian KPBU, serta percepatan pelaksanaan konstruksi sehingga penyelesaian dapat sinkron/selaras dengan penyelesaian jalur KA *mainline* yang dibangun melalui SBSN.

- c) Percepatan kajian teknis terkait kondisi beberapa titik/lokasi jalur KA Besitang – Sei Liput yang mengalami penurunan untuk selanjutnya pelaksanaan perbaikan konstruksi agar dapat selesai pada akhir tahun 2020. Apabila tidak dapat selesai tepat waktu maka dibutuhkan perpanjangan kontrak tahun jamak sampai dengan tahun 2021.
- d) Pembangunan akses jalur KA menuju Bandara YIA memerlukan percepatan pelaksanaan verifikasi dan pembayaran pengadaan lahan dengan koordinasi intensif dengan LMAN, BPN serta Pemerintah Daerah setempat, sehingga pelaksanaan konstruksi dapat lebih dioptimalkan dan dipercepat dimana target operasi KA Bandara YIA telah mundur menjadi Juli 2021 akibat keterlambatan penyelesaian lahan tersebut. Dengan mundurnya target operasi tersebut, maka perlu dipertimbangkan untuk revisi target Perjanjian Kinerja tahun 2020.
- e) Percepatan penyelesaian status lahan (sertifikat ganda) dan pelaksanaan penertiban (kebutuhan biaya kerohiman) untuk lahan akses pelabuhan Tanjung Emas sehingga konstruksi dapat dilaksanakan. Namun dengan adanya usulan pemotongan anggaran (akibat COVID-19), maka perlu dipertimbangkan untuk revisi target Perjanjian Kinerja tahun 2020.
- f) Percepatan penyelesaian perjanjian kerjasama oleh pihak-pihak terkait dalam pembangunan stasiun dan *skybridge* Bandar Udara Raden Inten sehingga dapat diperjelas kewenangan dan pembagian lingkup pekerjaan konstruksi oleh masing-masing unit kerja terkait. Namun dengan adanya usulan pemotongan anggaran (akibat COVID-19), maka perlu dipertimbangkan untuk revisi target Perjanjian Kinerja tahun 2020.

2.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pada Sasaran Kedua

Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang kedua adalah **Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi kereta api**, yang diukur dengan 3 IKP yaitu :

1. IKP 2 yaitu Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (*rate of accident*)

Rate of Accident (RoA) merupakan salah satu bentuk untuk mengkaji kondisi perkeretaapian di Indonesia adalah dengan menganalisis keselamatan perkeretaapian yang mangacu pada jumlah kecelakaan dibanding dengan Km tempuh dalam satu juta kejadian kecelakaan kereta api pada tahun tersebut. Formulasi yang digunakan yaitu :

$$Rate\ of\ Accident = \frac{Jumlah\ Kecelakaan}{Km\ tempuh} \times 1.000.000$$

Realisasi rasio kejadian kecelakaan sebesar 0,23 didapatkan dari perhitungan menggunakan formula di atas dimana jumlah kejadian kecelakaan pada triwula II tahun 2020 sebanyak 11 kali kejadian dan Km tempuhnya sebesar 47.530.210 Km, Rincian kejadian sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Kecelakaan per Jenis Kejadian Pada Tahun 2020

No	Jenis Kecelakaan	Jumlah Kejadian	Keterangan
1	Tabrakan KA dengan KA	-	-
2	Anjlok	10	<ul style="list-style-type: none"> • Petak jalur KA antara stasiun Citeras - stasiun Rangkasbitung (indikasi penyebab prasarana dan sarana); • Petak jalur KA antara stasiun Jatinegara – stasiun Pondok Jati (indikasi penyebab prasarana dan sarana); • Petak jalur KA antara stasiun Jatinegara – stasiun Pasar Senen (indikasi penyebab prasarana dan sarana); • Petak jalur KA antara stasiun Jakartakota – Jakarta (indikasi penyebab prasarana dan sarana); • Emplasemen Stasiun Kertapati (indikasi penyebab prasarana dan sarana); • Emplasemen Stasiun Tarahan (indikasi penyebab prasarana dan sarana);

No	Jenis Kecelakaan	Jumlah Kejadian	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> • Petak jalur KA antara stasiun Cilebut – Bojonggede (indikasi penyebab prasarana dan sarana); • Petak jalur KA stasiun Cilebut-Bojonggede (indikasi penyebab prasarana dan sarana); • Petak jalur KA antara Baturaja-Kemelak (indikasi penyebab prasarana dan sarana); • Emplasemen stasiun Penimur (indikasi penyebab prasarana).
3	Terguling	-	-
4	Lain-lain (Terbakar)	1	• Petak Patuguran – Karang Sari (indikasi penyebab sarana).
Jumlah		11	

Realisasi rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (*rate of accident*) s.d triwulan II tahun 2020 sebesar 0,23 kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh atau capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada triwulan II tahun 2020 dan pada target tahun 2020 sebesar 0,23 ratio kejadian kecelakaan/1 juta km tempuh. Realisasi Triwulan II dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (*rate of accident*) Tahun 2020

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Target		Realisasi		Kinerja (%)		Kinerja 2020 (%)
			TW1	TW2	TW1	TW2	TW 1	TW2	
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (<i>rate of accident</i>)	Rasio	0,23	0,23	0,23	0,25	0,23	90,23	100	100

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Pencapaian keberhasilan tersebut didukung juga adanya pelaksanaan kegiatan yang dapat menunjang keselamatan transportasi perkeretaapian antara lain:

- 1) Pelaksanaan kegiatan perawatan/rehabilitasi jalur dan jembatan kereta api (58,1 km) dan fasilitas operasi (28 unit) pada triwulan II tahun 2020 melalui mekanisme IMO;
- 2) Pemeriksaan peralatan penanganan kecelakaan kereta api serta penataan perlintasan jalur kereta api;
- 3) Monitoring dan sosialisasi bangunan liar di jalur kereta api;

- 4) Melaksanakan kegiatan workshop *preventif* kecelakaan serta FGD evaluasi keselamatan di bidang perkeretaapian di daerah rawan kecelakaan dan rawan bencana.

Upaya Peningkatan Kinerja

Dalam rangka mempertahankan/meningkatkan capaian kinerja rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api, diperlukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian sebagai regulator kepada operator, sosialisasi dan promosi keselamatan perkeretaapian serta pemantauan pelaksanaan perawatan prasarana perkeretaapian melalui skema IMO.

2. IKP 3 yaitu Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api

Realisasi rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api s.d triwulan II tahun 2020 sebesar 1,94 rasio gangguan keamanan/1 juta km atau capaian sebesar 169,76 % dari target yang ditetapkan pada triwulan II maupun target tahun 2020 yaitu sebesar 6,4 ratio gangguan keamanan/1 juta km. Jumlah gangguan keamanan s.d triwulan II 2020 terdapat sebanyak 84 kejadian berupa pelemparan batu, usaha mencelakakan kereta api dan pencurian asset kereta dengan jumlah Km tempuh sebesar 47.530.210 Km.

Tabel 2. 5 Jenis Gangguan Keamanan KA Tahun 2020

No	Jenis Gangguan KA Keamanan	Jumlah
1	Usaha sabotase/mencelakakan KA	6
2	Pelemparan	60
3	Pencurian Aset	18
Total		84

Tabel 2. 6 Capaian Kinerja Rasio Gangguan Keamanan Pada Transportasi Kereta Api Tahun 2020

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Target		Realisasi		Kinerja (%)		Kinerja Tahun 2020 %
			TW1	TW2	TW1	TW2	TW 1	TW2	
Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api	Rasio	6,4	6,4	6,4	1,94	1,77	169,76	172,34	172,34

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Pencapaian keberhasilan tersebut didukung juga adanya pelaksanaan kegiatan yang dapat menunjang keamanan transportasi perkeretaapian antara lain:

- 1) Sosialisasi dan promosi terkait keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api terhadap masyarakat dan instansi/Pemerintah Daerah terkait di sekitar jalur kereta api yang sering terjadi gangguan keamanan (vandalisme/pelemparan/sabotase);
- 2) Penataan perlintasan sebidang diantaranya melalui kegiatan peningkatan jalur kereta api eksisting;
- 3) Pelaksanaan KORWAS penegakan hukum di bidang perkeretaapian;
- 4) Pelaksanaan penyidikan dan evaluasi terhadap pelanggaran di bidang perkeretaapian.

Upaya Peningkatan Kinerja

Dalam rangka mempertahankan/meningkatkan capaian kinerja rasio kejadian gangguan keamanan transportasi kereta api, diperlukan sosialisasi intensif kepada masyarakat sekitar jalur KA serta peningkatan pengawasan dan pengendalian di lokasi-lokasi yang rentan gangguan keamanan dengan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

3. IKP 4 yaitu Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI

Realisasi pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI A pada triwulan II tahun 2020 sepanjang 4.636,952 Km. Hal tersebut berdasarkan laporan hasil kereta ukur dan *accelerometer* PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada bulan April tahun 2020 di pulau Jawa dan Sumatera, dimana berdasarkan hasil pengukuran jalur kereta api yang masuk Kategori 1 (kondisi : Nyaman, kecepatan 100 s.d 120 Km/jam) sepanjang 2.179,956 km dan Kategori 2 (Kondisi : Aman, Kecepatan : 80 s.d 100 km/jam) sepanjang 4.2456,996 Km dengan total panjang jalur kereta api sepanjang 5.636,746 Km.

Realisasi persentase pengoperasian jalur KA tersebut yang sesuai dengan TQI s.d triwulan II tahun 2020 sebesar 82,26%, atau capaian kinerja sebesar 100,93% dari target yang ditetapkan pada Triwulan II tahun 2020 yaitu sebesar 81,50%.

Tabel 2. 7 Capaian Kinerja Persentase peningkatan angkutan kereta api barang Tahun 2020

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Target		Realisasi		Kinerja (%)		Kinerja Tahun 2020 %
			TW1	TW2	TW1	TW2	TW 1	TW2	
Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	82,84	81,50	81,50	81,50	82,26	100	100,93	99,30

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Perhitungan data realisasi indikator kinerja kegiatan persentase pengoperasian jalur kereta api yang sesuai dengan TQI pada Triwulan II tahun 2020 berdasarkan kepada laporan hasil pengukuran bersama antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) menggunakan kereta ukur milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tahun 2020 di pulau Jawa dan Sumatera, realisasi kinerja indikator Persentase jalur kereta api yang sesuai dengan TQI adalah 82,26%. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Perhitungan Persentase Jalur Kereta Api yang Sesuai dengan TQI

Klasifikasi TQI	Kualifikasi			Panjang Jalur (Km'Jalur)	Jalur Terukur 2020 (Km'Jalur)		
TQI (Kecepatan 80 s.d 120 Km/jam)	Kategori 1	Kecepatan	: 100 s.d 120 km/jam	5.636,746	5.208,198	4.636,952	82,26%
		Kondisi	: Nyaman				
	Kategori 2	Kecepatan	: 80 s.d 100 km/jam				
		Kondisi	: Aman				
TQI (Kecepatan 40 s.d 80 Km/jam)	Kategori 3	Kecepatan	: 60 s.d 80 km/jam				
		Kondisi	: waspada				
	Kategori 4	Kecepatan	: 40 s.d 60 km/jam	571,246	10,13%		
		kondisi	: Bahaya				

Sumber: Laporan Hasil Pengukuran Kereta Ukur Bulan April tahun 2020

Dari hasil pengukuran dengan menggunakan kereta ukur jalur kereta api telah terukur sepanjang 5.208,198 Km dengan hasil yang masuk dalam kategori 1 (nyaman) dan 2 (aman) adalah sepanjang 4.636,952 Km, dan yang masuk kategori 3 (waspada) dan kategori 4 (bahaya) adalah sepanjang 571,246 km. Keberhasilan dalam pencapaian kinerja didukung beberapa faktor yaitu :

- 1) Pelaksanaan kegiatan peningkatan jalur kereta api secara bertahap (antara lain Bandung – Banjar – Kroya, Araskabu – Pematangsiantar, Lahat – Bungamas), sehingga berdampak pengurangan jalur kereta api yang masuk dalam kategori 3 (waspada) dan 4 (bahaya);

- 2) Koordinasi intensif dengan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian (PT. KAI) terkait data kondisi prasarana perkeretaapian dan lokasi-lokasi prioritas yang perlu ditingkatkan.

Upaya Peningkatan Kinerja

Dari hasil pengukuran kondisi jalur kereta api dengan menggunakan kereta ukur masih terdapat jalur yang masuk kategori 3 dan kategori 4, sehingga perlu diprogramkan dan dilaksanakan percepatan kegiatan peningkatan jalur kereta api pada lokasi-lokasi tersebut secara bertahap pada periode berikutnya.

2.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pada Sasaran Ketiga

Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang ketiga adalah **Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api**, yang diukur dengan 3 IKP yaitu :

1. IKP 5 yaitu Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Kereta Api

Realisasi persentase capaian *on Time Performance* (OTP) kereta api triwulan II tahun 2020 sebesar 65,34% diperoleh dari perbandingan antara jumlah realisasi kedatangan KA tepat waktu sebanyak 156.167 kedatangan KA tepat waktu dibandingkan dengan total kedatangan KA sebanyak 239.008 kedatangan. Capaian kinerja *on time performance* (OTP) transportasi kereta api s.d Triwulan II tahun 2020 sebesar 93,34% dari target yang ditetapkan pada Triwulan II tahun 2020 sebesar 70%.

Tabel 2. 9 Capaian Kinerja Persentase Capaian *on Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api Tahun 2020

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Target		Realisasi		Kinerja (%)		Kinerja Tahun 2020 %
			TW1	TW2	TW1	TW2	TW 1	TW2	
Persentase capaian <i>on time performance</i> (OTP) transportasi kereta api	%	70	70	70	60,39	65,34	86,27	93,34	93,34

Identifikasi Kendala/Permasalahan

Faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target antara lain:

- Banyaknya penyesuaian/pembatalan jadwal perjalanan kereta api dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sebagai upaya pembatasan pergerakan dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19.
- Evaluasi GAPEKA belum dilaksanakan pada periode triwulan II 2020 sehingga belum teridentifikasi kendala/permasalahan implementasi GAPEKA.

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya untuk meningkatkan capaian kinerja persentase capaian *on time performance* (OTP) transportasi kereta api antara lain :

- Pelaksanaan evaluasi GAPEKA dalam upaya pengawasan dan himbauan terhadap operator kereta api untuk meningkatkan *On Time Performance* khususnya kereta api penumpang sesuai Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) yang telah ditetapkan;
- Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Penyelenggara Sarana Perkeretaapian apabila terjadi keterlambatan perjalanan kereta api dengan memberikan kompensasi kepada penumpang sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 63 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api;
- Untuk kedepannya perlu dibuat sistem berbasis *online* terkait perjalanan kereta api yang terintegrasi dengan database Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sehingga data dapat diperoleh secara *real time*.

2. IKP 6 yaitu Persentase peningkatan angkutan kereta api penumpang

Jumlah penumpang terangkut dengan kereta api triwulan II tahun 2020 sebanyak 118.657.852 penumpang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jumlah penumpang KA PSO sebanyak 101.170.513 penumpang (KA Ekonomi sebanyak 12.188.924 penumpang dan KRL sebanyak 88.981.589 penumpang);
- b. Jumlah Penumpang KA Komersil sebanyak 8.601.608 penumpang;
- c. Jumlah Penumpang KA Perintis sebanyak 891.307 penumpang;
- d. Jumlah Penumpang KA Railink sebanyak 538.862 penumpang;
- e. Jumlah penumpang MRT Jakarta sebanyak 7.112.611 penumpang;

- f. Jumlah Penumpang LRT Jakarta (Velodrome - Kelapa Gading) sebanyak 342.951 penumpang.

Persentase peningkatan angkutan kereta api penumpang dibanding dengan realisasi triwulan II tahun 2019 sebesar -45,31% dengan jumlah penumpang pada triwulan II tahun 2019 sebanyak 216.947.962 penumpang. Realisasi persentase peningkatan angkutan kereta api penumpang s.d triwulan II tahun 2020 sebesar 0% (tidak terdapat peningkatan) atau capaian kinerja sebesar 0% dari target yang ditetapkan pada triwulan II sebesar 4,83%.

Tabel 2. 10 Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Angkutan Kereta Api Penumpang Tahun 2020

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Target		Realisasi		Kinerja (%)		Kinerja Tahun 2020 %
			TW1	TW2	TW1	TW2	TW 1	TW2	
Persentase peningkatan angkutan kereta api penumpang	%	4,83	4,83	4,83	0	0	0	0	0

Identifikasi Kendala/Permasalahan

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target antara lain:

- Adanya pembatasan penumpang dan pembatalan perjalanan kereta api baik kereta perkotaan maupun antar kota dalam upaya pembatasan pergerakan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19;
- Kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait himbauan tidak berpergian (*stay at home*) dengan penerapan *work from home* (WFH).

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya untuk meningkatkan capaian kinerja persentase peningkatan angkutan kereta api penumpang setelah berakhirnya masa darurat bencana akibat virus COVID-19 antara lain :

- Penambahan jumlah frekuensi dan penyesuaian jadwal keberangkatan kereta api dengan kebutuhan masyarakat termasuk penambahan rangkaian pada stamformasi kereta api khususnya untuk pelayanan kereta api perkotaan, sehingga kebutuhan *physical distancing* tetap dapat diimplementasikan.
- Sosialisasi dan upaya-upaya untuk meningkatkan minat masyarakat dalam penggunaan jasa transportasi kereta api dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19.

- Pengawasan penyelenggaraan angkutan kereta api berdasarkan standar pelayanan minimum dan Surat Edaran Menteri Perhubungan nomor 14 tahun 2020 Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Dengan adanya pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap jumlah angkutan penumpang kereta api, maka diperlukan revisi terhadap target peningkatan angkutan penumpang kereta api pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020.

3. IKP 7 yaitu Persentase peningkatan angkutan kereta api barang

Realisasi jumlah angkutan barang kereta api pada triwulan II tahun 2020 sebanyak 21.910.990 ton. Persentase peningkatan angkutan kereta api barang dibanding dengan realisasi triwulan II tahun 2019 sebesar -3,70% dengan jumlah angkutan barang pada triwulan II tahun 2019 sebanyak 22.753.852. Realisasi persentase peningkatan angkutan kereta api barang s.d triwulan II tahun 2020 sebesar 0% (tidak ada peningkatan angkutan barang), atau capaian kinerja sebesar 0% dari target yang ditetapkan pada triwulan II tahun 2020 yaitu sebesar 4,07%.

Realisasi angkutan barang s.d triwulan II per pulau sebagai berikut :

- Pulau Jawa total angkutan barang sebanyak 3.941.134 ton;
- Pulau Sumatera total angkutan barang sebanyak 17.969.856 ton.

Tabel 2. 11 Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Angkutan Kereta Api Barang Tahun 2020

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Target		Realisasi		Kinerja (%)		Kinerja Tahun 2020 %
			TW1	TW2	TW1	TW2	TW 1	TW2	
Persentase peningkatan angkutan kereta api barang	%	4,07	4,07	4,07	5,93	0	145,70	0	0

Identifikasi Kendala/Permasalahan

Angkutan barang kereta api tidak terdampak langsung dengan pandemi COVID-19, namun dengan turunnya aktivitas ekonomi nasional dan wilayah maka juga berpengaruh terhadap demand angkutan barang kereta api. Kendala/permasalahan yang mungkin dapat menurunkan kinerja terkait persentase peningkatan angkutan kereta api barang antara lain keterbatasan sarana kereta api untuk angkutan barang oleh operator/PT. KAI, serta kendala *double handling* khususnya terkait penanganan angkutan di area pelabuhan.

Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya untuk meningkatkan capaian kinerja persentase peningkatan angkutan kereta api barang antara lain:

- Sosialisasi dan promosi angkutan barang melalui kereta api untuk meningkatkan minat pengguna jasa angkutan kereta api barang dari pihak industri/pertambangan/pertanian/dan lainnya dengan beralih dari moda jalan yang juga perlu didukung dengan kebijakan Sektoral/Pemerintah Daerah.
- Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana perkeretaapian dengan pembangunan jalur ganda kereta api di wilayah Jawa dan Sumatera Bagian Selatan serta pengadaan sarana/gerbong oleh operator PT.KAI termasuk akses ke pelabuhan/*dry port*;
- Peningkatan peran swasta/badan usaha untuk melakukan investasi baik sarana dan prasarana perkeretaapian dengan dorongan kemudahan/penyederhanaan perijinan.

2.3 REALISASI ANGGARAN

Kronologis perubahan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian s.d triwulan II tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Kegiatan yang didanai melalui Rupiah Murni mengalami penghematan sebesar Rp. 4.703.480.757.000,-.dengan kronologis sebagai berikut :
 - 1) Terbit Perpres 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA. 2020 yang ditetapkan tanggal 3 April 2020 terkait kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan perubahan terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
 - 2) Kementerian Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 189.1/KMK.02/2020 tentang Perubahan atas Rincian Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran TA. 2020 dan Surat Menteri Keuangan RI nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Langkah – langkah penyesuaian belanja Kementerian Perhubungan TA. 2020. Berdasarkan lampiran surat tersebut, Kementerian Perhubungan mendapat alokasi penghematan sebesar

Rp. 10.366.209.938.000,- sehingga pagu semula sebesar Rp. 43.111.911.239.000,- menjadi sebesar Rp. 32.745.701.301,-.

- 3) Kementerian Perhubungan menerbitkan surat atas nama Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenhub Nomor : KU.001/3/5 Phb 2020 tanggal 20 April 2020 perihal Perubahan APBN di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Berdasarkan surat tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mendapatkan alokasi penghematan sebesar Rp. 4.703.480.757.000,-.
 - 4) Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan revisi anggaran ke Direktur Jenderal Anggaran dengan surat nomor : KU.002/9/10 Phb 2020 tanggal 22 April 2020 perihal Usulan Revisi Anggaran Dalam Rangka Penyesuaian Belanja TA. 2020 di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk penyelesaian revisi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian TA. 2020
- b. Kegiatan yang didanai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mengalami penambahan sebesar Rp. 2.636.403.016.000,- yang berasal dari luncturan sisa dana SBSN tahun anggaran 2019 dan revisi pergeseran anggaran sebesar Rp. 460.000.000.000,-
- c. Kegiatan yang didanai melalui Hibah Luar Negeri mendapat luncturan/lanjutan dari KfW sebesar Rp. 3.904.289.000,-

Total akhir alokasi dana Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada triwulan II tahun 2020 sebesar **Rp.10.500.536.501.000,-** dengan realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian s.d triwulan II tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 2.065.177.773.373,- (19.67%)**, dengan rincian realisasi per kegiatan dan sumber dana sebagai berikut:

Tabel 2. 12 Realisasi Anggaran Triwulan II Per Jenis Kegiatan Tahun 2020

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Perubahan Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi TW 1	Realisasi TW 2	%
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian	169.539.391.000	18.473.615.000	9.140.353.031	12.337.123.751	66,78
2.	Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	355.688.450.000	180.216.200.000	28.727.180.768	64.495.634.546	35,79
3.	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana serta Fasilitas Pendukung Kereta Api	11.540.304.351.000	10.500.536.501.000	955.423.593.355	2.065.177.773.373	18,65
4.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian	434.482.704.000	229.142.602.000	56.610.833.770	103.271.932.758	45,07
5.	Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian	63.695.057.000	15.896.447.000	6.894.256.347	9.283.127.097	58,40
TOTAL		12.561.159.705.746	10.500.536.501.000	1.056.796.217.271	2.065.177.773.373	19,67

Tabel 2. 13 Realisasi Anggaran Triwulan II Per Sumber Dana dan Jenis Belanja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020

No	Sumber Dana	Jenis Belanja									Jumlah		
		Pegawai			Barang			Modal			Pagu	Realisasi	%
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%			
1	Rupiah Murni	95.018.187.000	35.742.523.420	37,62	1.328.544.952.000	510.930.297.326	38,46	458.551.986.000	395.172.687.024	86,18	1.882.115.125.000	941.845.507.770	50,04
2	Pinjaman Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	11.000.000.000	-	-	-	-	-
3	Hibah Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	3.904.289.000	2.726.381.970	69,83	3.904.289.000	2.726.381.970	69,83
4	Surat Berharga Syariah Negara	-	-	-	-	-	-	8.603.517.087.000	1.120.605.883.633	13,02	8.603.517.087.000	1.120.605.883.633	13,02
Jumlah		95.018.187.000	35.742.523.420	37,62	1.328.544.952.000	510.930.297.326	38,46	9.076.973.362.000	1.518.504.952.627	16,73	10.500.536.501.000	2.065.177.773.373	19,67%

Tabel 2. 14 Realisasi Anggaran Triwulan II Per Unit Kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja			Total
			Pegawai	Barang	Modal	
1	445572 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	0 0.00%	10,981,737,000 5,168,372,140 (47.06%)	0 0.00%	10,981,737,000 5,168,372,140 (47.06%)
2	467005 BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	PAGU REALISASI	3,430,723,000 614,701,130 (17.92%)	161,827,473,000 45,375,189,193 (28.04%)	451,550,000 451,550,000 (100.00%)	165,709,746,000 46,441,440,323 (28.03%)
3	467309 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN	PAGU REALISASI	6,527,288,000 1,798,675,667 (27.56%)	11,825,027,000 6,606,255,465 (55.87%)	1,216,462,159,000 80,118,381,370 (6.59%)	1,234,814,474,000 88,523,312,502 (7.17%)
4	467321 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH	PAGU REALISASI	6,406,343,000 2,415,083,613 (37.70%)	11,913,335,000 5,485,240,354 (46.04%)	1,648,146,840,000 299,696,204,660 (18.18%)	1,666,466,518,000 307,596,528,627 (18.46%)
5	467337 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR	PAGU REALISASI	4,617,967,000 1,785,985,628 (38.67%)	11,126,911,000 5,548,713,741 (49.87%)	2,959,198,916,000 247,807,219,169 (8.37%)	2,974,943,794,000 255,141,918,538 (8.58%)
6	467345 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA	PAGU REALISASI	3,504,120,000 1,244,593,729 (35.52%)	10,292,846,000 4,112,698,096 (39.96%)	1,297,169,356,000 299,979,820,153 (23.13%)	1,310,966,322,000 305,337,111,978 (23.29%)
7	467352 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT	PAGU REALISASI	1,795,602,000 702,852,869 (39.14%)	4,952,837,000 2,482,941,788 (50.13%)	137,512,928,000 151,528,000 (0.11%)	144,261,367,000 3,337,322,657 (2.31%)
8	467364 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN	PAGU REALISASI	3,528,571,000 1,402,346,377 (39.74%)	8,638,983,000 5,343,986,228 (61.86%)	88,834,900,000 17,725,642,200 (19.95%)	101,002,454,000 24,471,974,805 (24.23%)
9	467373 BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	3,210,437,000 1,207,095,738 (37.60%)	11,817,300,000 8,859,998,564 (74.97%)	107,549,000,000 34,894,496,340 (32.45%)	122,576,737,000 44,961,590,642 (36.68%)

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja			Total
			Pegawai	Barang	Modal	
10	467385 BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	4,786,907,000 1,967,834,311 (41.11%)	9,138,979,000 5,805,180,051 (63.52%)	2,314,739,000 2,314,738,200 (100.00%)	16,240,625,000 10,087,752,562 (62.11%)
11	467462 PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	PAGU REALISASI	0 0.00%	20,386,269,000 17,983,651,360 (88.21%)	3,904,289,000 2,726,381,970 (69.83%)	24,290,558,000 20,710,033,330 (85.26%)
12	467478 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	0 0.00%	10,910,516,000 5,654,455,495 (51.83%)	1,491,751,000 1,491,747,250 (100.00%)	12,402,267,000 7,146,202,745 (57.62%)
13	467484 PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	0 0.00%	982,561,036,000 360,170,315,210 (36.66%)	453,289,323,000 380,799,453,127 (84.01%)	1,435,850,359,000 740,969,768,337 (51.60%)
14	467504 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	50,398,066,000 20,198,548,785 (40.08%)	52,879,378,000 28,609,844,427 (54.10%)	990,170,000 990,169,200 (100.00%)	104,267,614,000 49,798,562,412 (47.76%)
15	467515 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT	PAGU REALISASI	6,812,163,000 2,404,805,573 (35.30%)	9,292,325,000 3,723,455,214 (40.07%)	1,159,657,441,000 149,357,620,988 (12.88%)	1,175,761,929,000 155,485,881,775 (13.22%)
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	95,018,187,000 35,742,523,420 (37.62%)	1,328,544,952,000 510,930,297,326 (38.46%)	9,076,973,362,000 1,518,504,952,627 (16.73%)	10,500,536,501,000 2,065,177,773,373 (19.67%)

BAB III

PENUTUP

3.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN MONITORING KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2020

Tindak lanjut terhadap rekomendasi yang tertuang pada Laporan Monitoring Kinerja periode sebelumnya (triwulan I tahun 2020) disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Tindak Lanjut Rekomendasi pada Triwulan I Tahun 2020

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	IKP rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>) pada triwulan I capaian sebesar 90,23%, dengan rekomendasi peningkatan kinerja diantaranya identifikasi lokasi rawan anjlokkan jalur kereta api dengan peran aktif Balai Teknik Perkeretaapian setempat, peningkatan pengawasan kondisi prasarana dan sarana kereta api yang dioperasikan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan IMO (perawatan prasarana perkeretaapian).	Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Perawatan/pemeliharaan prasarana perkeretaapian melalui mekanisme IMO; b. Peningkatan kapasitas dan kehandalan prasarana perkeretaapian pada lintas utama Jawa dan Sumatera; c. Sertifikasi kelaikan sarana, prasarana serta SDM perkeretaapian, sertifikat dan ISO manajemen mutu audit dan inspeksi keselamatan; d. Pemeriksaan kompetensi awak sarana dan petugas prasarana.
2.	IKP persentase <i>on time performance</i> (OTP) pada triwulan I capaian sebesar 86,27% dengan rekomendasi peningkatan kinerja diantaranya mempersiapkan SOP pengaturan perjalanan kereta api apabila adanya bencana alam/rintangan jalur; meningkatkan pengawasan dan menghimbau operator KA untuk meningkatkan OTP sesuai GAPEKA yang telah ditetapkan, pengawasan implementasi pemberian kompensasi kepada penumpang apabila terjadi keterlambatan oleh operator, serta koordinasi secara intensif terkait penyampaian data performansi perjalanan kereta api termasuk penyampaian surat teguran apabila operator terlambat menyampaikan data. Selain itu kedepannya perlu dibuat sistem berbasis <i>online</i> yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sehingga data dapat diperoleh secara <i>real time</i> dan mudah untuk melakukan pengawasan terhadap realisasi perjalanan kereta api.	Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. SOP penanganan kondisi darurat termasuk apabila terjadi rintang jalan sebagaimana PM 121 tahun 2017 tentang Lalu Lintas telah disusun oleh badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian. b. Koordinasi dengan operator terkait performansi perjalanan kereta api dalam pelaksanaan pemantauan pengendalian pelayanan transportasi perkeretaapian pada masa PSBB dan masa adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah COVID-19 melalui pelaporan rutin setiap hari. c. Evaluasi GAPEKA belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada periode selanjutnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		d. Pembangunan sistem berbasis online yang terintegrasi terkait kinerja lalu lintas dan angkutan (data warehouse) telah diprogramkan tahun 2020, namun ditunda pelaksanaannya karena adanya penghematan anggaran dampak COVID-19.
3.	IKP persentase peningkatan angkutan kereta api penumpang pada triwulan I capaian sebesar 0%, dengan rekomendasi peningkatan kinerja diantaranya sosialisasi aktif oleh pemerintah dan operator untuk peningkatan minat masyarakat pasca dampak COVID-19 serta peningkatan pelayanan angkutan kereta api (waktu tempuh, ketepatan waktu, kapasitas, frekuensi, kenyamanan).	Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain: a. Sosialisasi telah dilakukan terhadap pelayanan angkutan kereta api yang masih beroperasi pada masa PSBB khususnya KA perkotaan (antara lain KRL Jabodetabek) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan pembatasan waktu operasional. b. Dalam upaya penyediaan layanan yang bersifat darurat dan mendukung kegiatan ekonomi yang diperbolehkan oleh Gugus Tugas COVID-19, mulai tanggal 12 Mei s.d 11 Juni 2020 diselenggarakan pelayanan angkutan kereta api pada masa PSBB melalui kereta api luar biasa (KLB) dengan 3 lintas pelayanan dengan kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan dari Gugus Tugas COVID-19.
4.	Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian oleh pimpinan unit kerja, termasuk melakukan revisi pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk dialihkan ke kegiatan yang mendesak/prioritas lainnya	a. Evaluasi sudah dilaksanakan secara berkala melalui rapat staf Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan Direktur, Kepala Balai, dan para PPK untuk percepatan pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian dan penyerapan anggaran. b. Revisi kegiatan untuk pengalihan ke kegiatan yang prioritas telah dilakukan melalui rekomposisi kegiatan SBSN tahun 2020 serta revisi untuk pemenuhan kebutuhan penanganan COVID-19.

3.2 KESIMPULAN

- a. Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II tahun 2020 Direktorat Jenderal Perkeretaapian disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun

2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- b. Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian triwulan II tahun 2020 menggambarkan program dan kegiatan yang dicapai s.d triwulan II tahun 2020 berdasarkan indikator kinerja program sesuai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020, sehingga dapat terukur nilai manfaat dari pembangunan perkeretaapian. Capaian rata-rata tahun triwulan II 2020 adalah sebesar 80,95, dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SATUAN	TARGET TRIWULAN II	REALISASI TRIWULAN II	% CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II
SP1 Meningkatnya Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,31	0,31	100
SP3 Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan transportasi kereta api	IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (<i>rate of accident</i>)	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh	0,23	0,23	100
	IK3 Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api	Kejadian gangguan keamanan/ 1 juta km tempuh	6,4	1,77	172,34
	IK4 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	81,50	82,26	100,93
SP3 Meningkatkan Kinerja Pelayanan sarana dan prasarana transportasi kereta api	IK5 Persentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api	%	70	65,34	91,39
	IK6 Persentase peningkatan angkutan kereta api penumpang	%	4,83	0	0
	IK7 Persentase peningkatan angkutan kereta api barang	%	4,07	0	0
RATA-RATA % CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II					80,95

3.3 REKOMENDASI

Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada periode mendatang, berdasarkan hasil monitoring capaian kinerja triwulan II diperoleh beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Program yang tidak mencapai target pada triwulan II tahun 2020, diperlukan upaya perbaikan sebagai berikut :

- a. *Persentase On Time Performance (OTP)*

Upaya perbaikan untuk peningkatan capaian pada triwulan selanjutnya adalah pelaksanaan evaluasi GAPEKA dalam upaya pengawasan dan himbauan terhadap operator kereta api untuk meningkatkan *On Time Performance* khususnya kereta api penumpang sesuai Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) yang telah ditetapkan. Selain itu kedepannya perlu dibuat sistem berbasis online terkait perjalanan kereta api yang terintegrasi dengan database Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sehingga data dapat diperoleh secara *real time*.

- b. *Persentase peningkatan angkutan kereta api penumpang*

Upaya perbaikan untuk peningkatan capaian pada triwulan selanjutnya adalah penambahan jumlah frekuensi dan penyesuaian jadwal keberangkatan kereta api dengan kebutuhan masyarakat khususnya untuk pelayanan kereta api perkotaan, sehingga kebutuhan *physical distancing* tetap dapat diimplementasikan sesuai protokol kesehatan COVID-19. Selain itu juga diperlukan pengawasan penyelenggaraan angkutan kereta api berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan nomor 14 tahun 2020 Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- c. *Persentase peningkatan angkutan kereta api barang*

Upaya perbaikan untuk peningkatan capaian pada triwulan selanjutnya adalah sosialisasi dan promosi angkutan barang kereta api, serta percepatan peningkatan kapasitas prasarana dan sarana perkeretaapian dengan pembangunan jalur ganda kereta api di wilayah Jawa dan Sumatera Bagian Selatan dan pengadaan sarana/gerbong oleh operator. Selain itu juga diperlukan dorongan

kemudahan/penyederhanaan perijinan untuk peningkatan peran swasta/badan usaha untuk melakukan investasi baik sarana dan prasarana perkeretaapian.

2. Dibutuhkan revisi Perjanjian Kinerja tahun 2020 untuk menyesuaikan target kinerja berdasarkan evaluasi progress capaian pada triwulan II tahun 2020 serta dengan adanya revisi/perubahan dokumen anggaran yang telah dilakukan.

LAMPIRAN
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2020
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tahun Anggaran : 2020

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA 2020	KETERANGAN
				TW 1	TW2	TW 1	TW 2	TW 1	TW 2		
SP1 Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,39	0,31	0,31	0,31	0,31	100,00%	100,00%	79,49%	
SP2 Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api	IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident)	Kejadian kecelakaan/1 juta km tempuh	0,23	0,23	0,23	0,25	0,23	90,23%	100,00%	100,00%	11 kecelakaan (10 anjlok dan 1 kebakaran) dan Km tempuh 47.530.210 Km
	IK3 Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api	Kejadian gangguan keamanan/1 juta km tempuh	6,4	6,4	6,4	1,94	1,77	169,76%	172,34%	172,34%	84 gangguan keamanan dan tempuh 47.530.210 Km
	IK4 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	82,84	81,50	81,50	81,50	82,26	100,00%	100,93%	99,30%	Panjang jalur yang masuk dalam TQI I dan 2 sepanjang 4.593,718 Km
SP3 Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api	IK5 Persentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api	%	70	70	70	60,39	65,34	86,27%	93,34%	93,34%	Jumlah kedatangan KA tepat waktu sebanyak 156.167 KA dengan total jumlah kedatangan KA sebanyak 239.008 KA
	IK6 Persentase peningkatan angkutan kereta api penumpang	%	4,83	4,83	4,83	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	Jumlah penumpang terangkut dengan kereta api triwulan II tahun 2020 sebanyak 118.657.852 (Realisasi jumlah penumpang pada TW 2 tahun 2019 sebanyak 216.947.962)
	IK7 Persentase peningkatan angkutan kereta api barang	%	4,07	4,07	4,07	5,93	-4,10	145,70%	0,00%	0,00%	Realisasi jumlah angkutan barang kereta api pada triwulan II tahun 2020 sebanyak 21.910.990 Ton (Realisasi jumlah angkutan barang pada TW 2 tahun 2019 sebanyak 22.753.852)
Rata-rata								98,85%	80,95%	77,78%	

**MONITORING ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	ALOKASI	KEGIATAN	TARGET S.D BULAN JUNI				REALISASI BULAN JUNI		% CAPAIAN BULAN JUNI		EVALUASI	REANCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN				
						Vol	%	Vol	%	Vol	Vol	%	%				
SP1 Meningkatkan KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,39	9.391.389.742.000	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana serta fasilitas pendukung kereta api termasuk pembangunan jalur kereta api ke simpul transportasi (pelabuhan dan bandara) serta PKN/PKW	0,31	79,49%	2.817.416.922.600	30,00%	0,31	1.654.867.283.009	100,00%	58,74%	Masih terdapat kegiatan yang dalam tahap pelelangan dan penyiapan lahan	Percelatan pelaksanaan pelelangan dan progres konstruksi serta revisi perjanjian kinerja	Dit. Prasarana Perkeretaapian	
SP3 Meningkatkan KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api	IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident)	Kejadian kecelakaan/1 juta km tempuh	0,23	928.930.559.000	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (M), Sertifikasi Kelakuan Sarana dan Prasarana, Sertifikasi kompetensi SDM dan Sertifikat Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian	0,23	100%	418.018.751.550	45,00%	0,23	345.814.855.818	100,00%	82,73%	IM telah kontrak, persiapan dan penyusunan program kerja kegiatan peningkatan keselamatan	Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan inspeksi secara berkala (prasarana, sarana, sdm) termasuk perawatan prasarana perkeretaapian (M)	Dit. Keselamatan Perkeretaapian, Dit. Sarana dan Dit. Prasarana	
	IK3 Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api	Kejadian gangguan/1 juta km tempuh	6,4		Pencegahan dan penegakan hukum bidang keselamatan	6,4	100%					1,77		172,34%	Persiapan dan penyusunan program kerja kegiatan pengawasan dan penegakan hukum		Kegiatan pengawasan dan penegakan hukum dilaksanakan sesuai jadwal secara berkala
	IK7 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	82,84		Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IO)	81,50	98,38%					82,26		100,93%	Inventaris hasil pembangunan		Pengoperasian Kereta Ukur untuk memonitor kondisi prasarana secara berkala berkoordinasi dengan PT. KAI
SP4 Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api	IK4 Persentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api	%	70	180.216.200.000	Pelaksanaan monitoring GAPEKA	70	100%	63.075.670.000	35,00%	65,34	64.495.634.546	93,34%	102,25%	Pelaksanaan monitoring realisasi GAPEKA	Koordinasi dengan Operator terkait implementasi GAPEKA	Dit. LLAKA	
	IK5 Persentase peningkatan angkutan kereta api penumpang	%	4,83		Kegiatan pembangunan dan pengelolaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan KA termasuk Kegiatan Subsidi Angkutan Perintis dan Monitoring Public Service Obligation (PSO)	4,83	100%					0,00		0,00%	Jumlah penumpang terangkut dengan kereta api triwulan II tahun 2020 sebanyak 118.657.852 (Realisasi jumlah penumpang pada TW 2 tahun 2019 sebanyak 216.947.962)		Koordinasi dengan Operator terkait implementasi SPM serta revisi perjanjian kinerja
	IK6 Persentase peningkatan angkutan kereta api barang	%	4,07		4,07	100%	0,00					0,00%		Realisasi jumlah angkutan barang kereta api pada triwulan II tahun 2020 sebanyak 21.910.990 Ton (Realisasi jumlah angkutan barang pada TW 2 tahun 2019 sebanyak 22.753.852)	Koordinasi dengan Operator terkait pelaporan secara berkala		

**PIHAK PERTAMA,
Direktur Jenderal Perkeretaapian**



ZULFIKRI
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19620709 199203 1 002

**MONITORING ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	ALOKASI	KEGIATAN	TARGET S.D BULAN MEI				REALISASI BULAN MEI		% CAPAIAN BULAN MEI		EVALUASI	REANCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
						TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN					
						Vol	%	Vol	%	Vol	Vol	%	%					
SP1 Meningkatkan KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,39	9.686.797.639,000	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana serta fasilitas pendukung kereta api termasuk pembangunan jalur kereta api ke simpul transportasi (pelabuhan dan bandara) serta PKNPKW	0,31	89,74%	2.421.699.409,750	25,00%	0,31	1.687.118.991,769	100%	70%	Masih terdapat kegiatan yang dalam tahap pelengkapan dan persiapan lahan	Percepatan pelaksanaan pelengkapan dan progres konstruksi serta revisi perjanjian kinerja	Dit. Prasarana Perkeretaapian		
SP3 Meningkatkan KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api	IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident)	Kejadian kecelakaan/1 juta km tempuh	0,23	633.522.662,000	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian dan Parawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IM), Sertifikasi Kelalaian Sarana dan Prasarana, Sertifikasi kompetensi SDM dan Sertifikat Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian	0,23	100%	253.409.064,800	40,00%	0,25	332.010.905,921	90,23%	131%	IM telah kontrak, persiapan dan penyusunan program kerja kegiatan peningkatan keselamatan	Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan inspeksi secara berkala (prasarana, sarana, sdm) termasuk perawatan prasarana perkeretaapian (IM)	Dit. Keselamatan Perkeretaapian		
	IK3 Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api	Kejadian gangguan/1 juta km tempuh	6,4		Pencegahan dan penegakan hukum bidang keselamatan	6,4	100%							1,94	169,76%		Persiapan dan penyusunan program kerja kegiatan pengawasan dan penegakan hukum	Kegiatan pengawasan dan penegakan hukum dilaksanakan sesuai jadwal secara berkala
	IK7 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TCI	%	82,84		Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IO)	81,50	98,38%							81,50	100%		0%	Inventaris hasil pembangunan
SP4 Meningkatkan KINEJUA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api	IK4 Persentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api	%	70	180.216.200,000		70	100%	54.064.860,000	30,00%	60,39	55.654.383,768	86,27%	103%	Pelaksanaan monitoring realisasi GAPEKA	Koordinasi dengan Operator terkait implementasi GAPEKA	Dit. LLAKA		
	IK5 Persentase peningkatan angkutan kereta api penumpang	%	4,83			-	-			-		0%		(jumlah angkutan penumpang : 111.370.914 penumpang) Pelaksanaan monitoring realisasi angkutan penumpang PSO, perintis dan komersial	Koordinasi dengan Operator terkait implementasi SPM serta revisi perjanjian kinerja			
	IK6 Persentase peningkatan angkutan kereta api barang	%	4,07		Kegiatan pembangunan dan pengelolaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan KA termasuk Kegiatan Subsidi Angkutan Perintis dan Monitoring Public Service Obligation (PSO)	-	4,07			5,93		145,70%		(Jumlah angkutan barang : 12.673.950 ton) Pelaksanaan monitoring realisasi angkutan barang	Koordinasi dengan Operator terkait pelaporan secara berkala			

**PIHAK PERTAMA,
Direktur Jenderal Perkeretaapian**



ZULFIKRI
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19620709 199203 1 002

**MONITORING ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	ALOKASI	KEGIATAN	TARGET S.D BULAN APRIL				REALISASI BULAN APRIL		% CAPAIAN BULAN APRIL		EVALUASI	REANCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET OUTPUT		TARGET ANGGARAN		REALISASI OUTPUT	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN				
						Vol	%	Vol	%	Vol	Vol	%	%				
SP1 Meningkatkan KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional	IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,39	8.158.279.825,000	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana serta fasilitas pendukung kereta api termasuk pembangunan jalur kereta api ke simpul transportasi (pelabuhan dan bandara) serta PKN/PKW	0,31	89,74%	1.223.741.973,750	15,00%	0,31	995.709.924,005	100%	81%	Masih terdapat kegiatan yang dalam tahap pelelangan dan penyiapan lahan	Percepatan pelaksanaan pelelangan dan progres konstruksi Penyelesaian kesiapan lahan (stasiun bandara Radin Inten II, Akses Pelabuhan Tanjung Mas dan Jalur KA Makassar Parepare	Dit. Prasarana Perkeretaapian	
SP3 Meningkatkan KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api	IK2 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident)	Kejadian kecelakaan/1 juta km tempuh	0,23	1.563.695.057,000	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IM), Sertifikasi Kelaikan Sarana dan Prasarana, Sertifikasi kompetensi SDM dan Sertifikat Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian	0,23	100%	312.739.011,400	20,00%	0,25	330.353.629,869	90,23%	106%	IM telah kontrak, persiapan dan penyusunan program kerja kegiatan peningkatan keselamatan	Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan inspeksi secara berkala (prasarana, sarana, sdm) termasuk perawatan prasarana perkeretaapian (IM)	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	
	IK3 Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api	Kejadian gangguan/1 juta km tempuh	6,4		Pencegahan dan penegakan hukum bidang keselamatan	6,4	100%		1,94			169,76%		Persiapan dan penyusunan program kerja kegiatan pengawasan dan penegakan hukum	Kegiatan pengawasan dan penegakan hukum dilaksanakan sesuai jadwal secara berkala		
	IK7 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI	%	82,84		Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IO)	81,50	98,38%		81,50			100%		0%	Inventaris hasil pembangunan		Pengoperasian Kereta Ukur untuk memonitor kondisi prasarana secara berkala
	IK4 Persentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api	%	70		Pelaksanaan monitoring GAPEKA	70	100%		60,39			86,27%		Pelaksanaan monitoring realisasi GAPEKA	Koordinasi dengan Operator terkait implementasi GAPEKA		
SP4 Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api	IK5 Persentase peningkatan angkutan kereta api penumpang	%	4,83	2.841.735.071,000	Kegiatan pembangunan dan pengelolaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan KA termasuk Kegiatan Subsidi Angkutan Perintis dan Monitoring Public Service Obligation (PSO)	-	-	568.347.014,200	20,00%	-	506.939.958,679	0%	89%	(Jumlah angkutan penumpang : 111.370.914 penumpang) Pelaksanaan monitoring realisasi angkutan penumpang PSO, perintis dan komersial	Koordinasi dengan Operator terkait implementasi SPM	Dit. LLAKA	
	IK6 Persentase peningkatan angkutan kereta api barang	%	4,07	-	4,07	-	5,93	145,70%	(Jumlah angkutan barang : 12.673.950 ton) Pelaksanaan monitoring realisasi angkutan barang	Koordinasi dengan Operator terkait pelaporan secara berkala							

**PIHAK PERTAMA,
Direktur Jenderal Perkeretaapian**



ZULFIKRI
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19620709 199203 1 002